

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin oleh Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden serta oleh menteri-menteri negara. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia Kewenangan Pemerintah Pusat. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beraneka ragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit

kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Lembaga legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat propinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan walikota. Pemerintah daerah merupakan entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat di bandingkan dan dapat di pahami. Berdasarkan unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemakainya. Informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pemakai dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masalah atau masalah ini dan masa depan; Andal apabila independen dan dependen dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jelas dan jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat dibandingkan antar tahun, laporan keuangan tahun sekarang dengan laporan keuangan sebelumnya dan dapat dipahami oleh pemakainya. Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan

regulasi dari waktu ke waktu Perubahan tersebut merupakan rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan *good governance*.

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan (Kusuma, 2008). Pelanggaran dalam menyajikan laporan keuangan pada saat ini masih sering terjadi, seperti melakukan pemalsuan laporan untuk merugikan beberapa kalangan. Kegiatan ini menyatakan betapa pentingnya aktivitas akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dengan baik dalam perusahaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya *good governance*. *Good Governance* merupakan suatu rancangan pendekatan yang berprioritas terhadap pembangunan sektor public dari pemerintah yang baik. Negara dengan birokrasi pemerintah diharuskan untuk merubah pola pelayanan dari birokratis etis ke birokratis populis. (Mardiasmo 2016: 480). Menurut World Bank, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Peraturan Pemerintah Nomor

101 tahun 2000 merumuskan arti *Good Governance* ialah “kepemerintahan yang mengemban, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Konsep ini menekankan pada dua aspek, pertama pentingnya pemegang saham memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparansi terhadap semua informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maramis, dkk (2018) dan Mia oktarina, dkk (2016) menyatakan bahwa *Good governance* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Darmansyah, dkk (2017) menyatakan bahwa *Good governance* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah pencatatan, pengikhtisaran, proses pengumpulan data hingga pelaporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemakaian laporan keuangan daerah (Drama 2014:8). Dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi, sebagaimana yang telah dinyatakan. Sedangkan dalam permendagri No.13 tahun 2006 diungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004:56). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini bertujuan untuk penataan yang terstruktur terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novtania, dkk (2017) dan Utama, (2017) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara menurut Maramis, dkk (2018) mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang berlatar belakang pendidikan dibidang akuntansi maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Armel, 2017).

Sumber daya manusia yang ahli dibidangnya akan mampu memahami sistem-sistem yang berkaitan dengan akuntansi dengan baik. Kegagalan dalam memahami dan mengimplementasikan sistem-sistem akuntansi yang ada akan berdampak pada kesalahan dalam membuat laporan keuangan yang dibuat akan menyebabkan ketidaksesuaian laporan keuangan pemerintah dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2018) dan Utama (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara menurut Suyono (2016) mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMDA atau sistem informasi manajemen keuangan daerah adalah suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan kas daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara otomatis dengan pemanfaatan pengelolaan data elektronik. Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) merupakan aplikasi atau software yang diperuntukan bagi pemerintah, yang mampu memberi kemudahan untuk meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah, hingga fungsi akuntansi dan pelaporan. Suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menjadikan pedoman dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SIMDA secara umum digunakan dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (Khirunnisa & dkk,

2016). Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Abidin, dkk (2018) dan Alfiani, (2017) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Sementara menurut Ervina, (2017) mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten Pati tiga kali berturut-turut Pati mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kemarin, pada tahun 2017 Pati kembali mendapatkan Opini WTP. Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pati atas keberhasilan Pati menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Bupati Pati Haryanto. Pemberian penghargaan dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab se-Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang pada hari Rabu tanggal 31/10/2018. Bupati Pati Haryanto mengaku puas dengan penghargaan tersebut. Bupati menambahkan, dengan diraihnya opini WTP tersebut tentu akan menjadi pertimbangan pusat saat menentukan Dana Insentif Daerah (DID). Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah berharap penghargaan yang diberikan atas hasil penilaian BPKRI tersebut mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (www.patikab.go.id :2018)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap penelitian terdahulu, sehingga masih layak untuk diteliti kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maramis, dkk (2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan *good governance* dan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Maramis, dkk (2018), perbedaan pertama yaitu menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen daerah. Penambahan variabel kompetensi sumber daya manusia karena manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Suatu sistem sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari pendidikan, pengalaman dan pelatihan.

Penambahan variabel sistem informasi manajemen daerah karena dengan adanya aplikasi SIMDA mempermudah dalam menghasilkan laporan keuangan yang mampu memenuhi karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Aplikasi SIMDA merupakan sistem yang berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan guna mencapai akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik dientitas pelaporan (SKPKD) dan entitas akuntansi (OPD). Aplikasi ini mampu membantu pemerintah daerah mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan APBD hingga pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

1.2 Ruang Lingkup

Menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka peneliti ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel opini penerapan *good governance* (X_1), sistem akuntansi keuangan (X_2), Kompetensi sumber daya manusia (X_3), dan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) (X_4) sebagai variabel independen, Kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek dari penelitian ini difokuskan di organisasi perangkat daerah kabupaten Pati.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka timbul pertanyaan bagi penulis sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah kabupaten Pati?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah kabupaten Pati?
3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kabupaten Pati?

4. Apakah terdapat pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kabupaten Pati.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kabupaten Pati.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kabupaten Pati.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kabupaten Pati.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta dapat mengaplikasikan teori dan praktek.

2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penelitian ini mampu memberikan bahan masukan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan referensi sebagai penunjang untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

